

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki luas wilayah terbesar diantara negara-negara lain di Asia Tenggara. Wilayah Indonesia terbentang dari ujung barat sampai ujung timur yang diawali pulau Weh di barat dan Merauke di timurnya, secara keseluruhan Indonesia memiliki luas sebesar 1,904,569 km².¹ Letak Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera menjadi salah satu aspek strategis, baik dalam geografis maupun astronomis karena hal tersebut menjadikan Indonesia penghubung antara benua Asia dan Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia menyadari bahwa keamanan nasionalnya menjadi bagian dari kepentingan strategis negara-negara lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan fungsi pertahanan negara Indonesia diarahkan untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang kondusif bagi stabilitas regional dan global.² Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2003 dinyatakan bahwa ancaman invasi atau agresi militer negara lain terhadap Indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya.³

Dengan mencermati perkembangan lingkungan keamanan strategis Indonesia pasca 2003, pada saat ini dan dalam beberapa tahun akan datang belum terdapat indikasi suatu ancaman militer konvensional yang mengarah ke wilayah

¹ *Geografi Indonesia*, (diakses pada 20 Desember 2011); diunduh dari <http://www.Indonesia.go.id/in/sekilas-Indonesia/geografi-Indonesia.html>

² *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, Departemen Pertahanan Indonesia, Jakarta, 2008, hal 6

³ *Ibid*, hal 7

Indonesia. Namun, kondisi yang kondusif ini tidak lalu membuat Indonesia mengabaikan kesiapsiagaannya dalam membangun kemampuan bangsa untuk melindungi NKRI.⁴ Kemampuan Indonesia untuk menjaga stabilitas regional dan global haruslah didukung dengan kemampuan dari perangkat yang dapat digunakan untuk menjalankan tugas tersebut, seperti unsur militer yang dimiliki Indonesia. Militer Indonesia yang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki tiga angkatan tempur yang terbagi dalam, TNI AD, TNI AU, TNI AL. Yang dari masing-masing angkatan memiliki tugas dan fungsi tersendiri dalam mengamankan wilayah Indonesia. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut ketiga angkatan tempur tersebut haruslah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai pada setiap angkatannya, agar dapat menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal.

Menurut Connie R Bakrie seorang pengamat militer dari Universitas Indonesia (UI) berpendapat bahwa, kekuatan maritim dan udara adalah hal yang dibutuhkan dalam menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia hal itu didasarkan pada kondisi Indonesia yang letak geografisnya lebih luas laut daripada daratan, maka alutsista yang dibutuhkan TNI seharusnya lebih dikonsentrasikan pada kekuatan laut dan ditopang persenjataan udara.⁵

⁴ *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, Departemen Pertahanan Indonesia, Jakarta, 2008, hal 6

⁵ *Pengamat Militer: Alutsista Laut & Udara, Kebutuhan Riil Pertahanan NKRI*, (diakses pada 06 Februari 2012); diunduh dari <http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/8554/pengamat-militer-alutsista-laut-udara-kebutuhan-riil-pertahanan-nkri>

Saat ini Indonesia - Korea Selatan menjalin sebuah kerjasama dalam proyek riset pesawat tempur dalam rangka modernisasi alat utama sistem persenjataan, sebenarnya peluncuran proyek riset pesawat tempur ini telah dimulai pada bulan Maret 2001 oleh presiden Kim Dae Juk pada upacara kelulusan Akademi Angkatan Udara Korea Selatan⁶ dan mengajak serta menjadikan Indonesia sebagai partner utama dari proyek ini. Namun karena masalah teknis dan ekonomi akhirnya proyek ini mengalami penundaan sampai pada tahun 2010. Pada Januari 2010 presiden Korea Selatan Lee Myung-Bak kembali mendorong agar proyek riset *Korean Fighter Experiment* kembali dijalankan, dan pada Maret 2010 Indonesia - Korea Selatan sudah menandatangani *Letter of Interest* pengembangan bersama pesawat tempur, dan 11 Agustus 2010 Indonesia meneken nota kesepahaman kerja sama produksi proyek *Korean Fighter Experiment*.⁷

Jika melihat kebelakang, dalam hal pemenuhan kebutuhan alutsista Indonesia selalu diisi oleh negara-negara produsen senjata seperti Uni Sovyet, Amerika, dan Inggris. Di tahun 1960an pada era Presiden Soekarno adalah masa kejayaan militer Indonesia, kekuatan militer Indonesia adalah salah satu yang terbesar dan terkuat di dunia. Bahkan pada saat itu, kekuatan Belanda, negara yang pernah menjajah Indonesia bisa dibilang tertandingi oleh kemampuan militer Indonesia⁸ yang memiliki teknologi peralatan tercanggih dan terbaru buatan Uni

⁶ *KAI KF-X*, (diakses pada 30 November 2011); diunduh dari http://en.wikipedia.org/wiki/KF-X_%28aircraft%29

⁷ *Di Balik Layanan Elang Emas*, (diakses pada 06 Februari 2012); diunduh dari, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2011/03/21/NAS/mbm.20110321.NAS136256.id.html>.

⁸ *Masa Kejayaan Militer Indonesia*, (diakses pada 20 Desember 2011); diunduh dari <http://forumom.com/news/?p=484>

Sovyet.⁹ Salah satu peralatan militer Indonesia yang ditakuti pada saat itu adalah KRI Irian, salah satu kapal perang terbesar dan tercepat di dunia buatan Sovyet, selain itu Indonesia juga membeli berbagai macam peralatan militer, antara lain 41 Helikopter MI-4 (angkutan ringan), 9 Helikopter MI-6 (angkutan berat), 30 pesawat jet MiG-15, 49 pesawat buru sergap MiG-17, 10 pesawat buru sergap MiG-19, 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 12 kapal selam kelas Whiskey dan puluhan korvet. Dari jenis pesawat pengebom, terdapat sejumlah 22 pesawat pembom ringan Ilyushin Il-28, 14 pesawat pembom jarak jauh TU-16, dan 12 pesawat TU-16 versi maritim yang dilengkapi dengan persenjataan peluru kendali anti kapal (rudal) *air to surface* jenis AS-1 Kennel. Sementara dari jenis pesawat angkut terdapat 26 pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan AQvia-14, 6 pesawat angkut berat jenis Antonov An-12B buatan Uni Soviet.¹⁰

Selain dengan Uni Sovyet, Indonesia juga memenuhi kebutuhan akan peralatan militernya dengan peralatan militer dari negara seperti Amerika dan Inggris yang kemudian menjadi partner utama Indonesia dalam urusan peralatan militer, sampai saat ini Indonesia sekurangnya masih memiliki sekitar 83 pesawat tempur dari kedua negara tersebut yang terdiri dari 4 jenis pesawat tempur buatan Amerika yaitu, F-16A Fighting Falcon, F-5E Tiger, A-4 E Skyhawk CAS, OV-10F Bronco Coin dan 2 jenis pesawat tempur buatan Inggris Hawk Mk.209, Hawk Mk 53¹¹, dan juga pesawat angkut berat jenis C-130 Hercules 10 unit, C-130B 3

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Operasi Trikora*, (diakses pada 20 Desember 2011); diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Operasi_Trikora

¹¹ *Indonesia dan Embargo Amerika*, Jaleswari Pramodhawardani, (diakses pada 14 Oktober 2011); diunduh dari <http://metrotvnews.com/read/analisdetail/2010/08/03/54/Indonesia-dan-Embargo-Amerika>

unit. C-130H 3 unit, C-130HS (*long body*) 7 unit, C-130 MP (patroli maritim) 1 unit, 2 unit KC-130 (versi air refuelling C-130) untuk keperluan pengisian bahan bakar di udara (sampai hari ini masih beroperasi).¹²

Setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman maka terciptalah suatu hubungan kerjasama dalam proyek *Korean Fighter Experiment* antara Indonesia dengan Korea Selatan sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam mengapa pemerintah Indonesia memilih bekerja sama dengan Korea Selatan dalam pemenuhan kebutuhan pesawat tempur dibandingkan dengan tetap memenuhinya dengan cara pembelian dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris yang sebelumnya juga sudah menjadi langganan Indonesia dalam proyek pengadaan alat - alat militer dan juga ketiga negara tersebut secara faktual jelas lebih maju dalam pengalaman membuat dan kemampuan alutsistanya dan teknologi militernya dibanding Korea Selatan yang bisa dibilang baru dalam hal pengembangan teknologi militernya.

B. Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam proyek riset pesawat tempur.
2. Untuk mengetahui mengapa Indonesia memilih dan melakukan kerjasama riset pesawat tempur dengan Korea Selatan.

¹² *C-130 Hercules*, (diakses pada 07 Februari 2012); diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/C-130_Hercules#Pesawat_di_Indonesia

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah untuk di analisa yaitu :

”Mengapa Indonesia memilih melakukan kerjasama dengan Korea Selatan dalam proyek riset pesawat tempur ?”

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk dapat menganalisa pokok permasalahan yang ada, penulis mencoba untuk menerapkan beberapa konsep maupun teori dalam ranah Ilmu Hubungan Internasional. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pengkajian masalah, dapat menjadi semakin terarah dan terkonsep dengan jelas. Adapun konsep ataupun teori yang digunakan antara lain ; Teori Kepentingan Nasional dan Model Aktor Rasional.

Pembuatan Kebijakan Luar Negeri sering didahului oleh kepentingan nasional. Artinya, kebijakan luar negeri sebuah negara selalu dipengaruhi oleh kondisi domestiknya atau dalam negerinya baik itu kepentingan ekonomi, politik, serta sosial. Batasan politik luar negeri menurut Jack C. Plano dan Ray Olton adalah :

Politik Luar Negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk

*mencapai tujuan nasionalnya yang spesifik, dituangkan dalam terminologi kepentingan nasionalnya.*¹³

Dari definisi yang dijelaskan oleh Jack C. Plano dan Ray Olton tersebut, terdapat empat unsur didalam politik luar negeri, yaitu strategi, aktor pembuat keputusan, lingkungan eksternal, kepentingan suatu negara. Jadi politik luar negeri adalah suatu langkah nyata yang di ambil guna mencapai, mempertahankan, dan melindungi kepentingan negara tersebut.

1. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional merupakan sebuah konsep yang cukup populer digunakan dalam menganalisa hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, hingga memberikan anjuran untuk sebuah perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara.¹⁴ Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur-unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup sebuah bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi sehingga perlu suatu usaha untuk memperoleh kepentingan tersebut. Menurut Hans J. Morgenthau didalam "*The Concept of Interest Defined in Terms of Power*". Konsep kepentingan nasional (*interest*) yang didefinisikan dalam istilah "*power*" menurut Morgenthau berada

¹³ Jack C. Plano dan Ray Olton, *The International Relation Dictionary*, 3rd ed. (England: Lio Press Ltd., 1982), hal. 7

¹⁴ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LPES, 1990, hal. 139

diantara nalar, akal atau alasan yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. Dengan kata lain, *power* merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional.¹⁵

Morgenthau berpendapat bahwa strategi diplomasi berdasarkan kepada kepentingan nasional. Kepentingan nasional tersebut digunakan untuk mengejar "*power*" yang dapat digunakan untuk membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Menurut Morgenthau, dengan memiliki *power* maka suatu negara dapat mengadili negara lain seperti mengadili negara sendiri dan kemudian dapat meningkatkan kepentingan negara yang memiliki *power*. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik paksaan, atau kerjasama (*cooperation*).¹⁶ Karena itu, kekuasaan nasional dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional.

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau *state* berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep '*power*' kepentingan '*interest*' didefinisikan ke alam terminologi *power*.¹⁷

¹⁵ Aleksius Jemadu, *Politik Global Dalam Teori dan Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hal. 67

¹⁶ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LPES, 1990, hal. 140

¹⁷ Antonius Sitepu, *Teori Realisme Politik Hans.J.Morgenthau Dalam Studi Politik dan HI*, hal. 56

Ada kepentingan nasional yang bersifat vital bagi suatu negara karena terkait dengan eksistensinya. Untuk tetap berdiri sebagai negara berdaulat suatu negara harus mempertahankan kedaulatan atau yuridiksinya dari campur tangan asing. Selain itu negara itu berkepentingan untuk mempertahankan keutuhan wilayah (*territorial integrity*) sebagai wadah bagi entitas politik tersebut. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Jika kepentingan vital atau strategis suatu negara menjadi taruhan dalam interaksinya dengan aktor lain, maka negara tersebut akan menggunakan segala instrumen yang dimilikinya termasuk kekuatan militer untuk mempertahankannya.

Maksud dan tujuan dari dibuatnya alat persenjataan (pesawat tempur) yang canggih di Indonesia baik untuk sekarang dan juga kebutuhan dimasa depan, ditujukan untuk dapat digunakan sebagai sarana dalam mencapai salah satu unsur dari kepentingan nasional yaitu menjaga kemandirian wilayah dan eksistensi negara Indonesia karena tercapainya salah satu kepentingan nasional dari suatu negara akan memberikan keuntungan terhadap negara tersebut dalam hal upaya untuk mencapai kepentingan nasional yang lainnya dan memberikan keuntungan pula dalam hubungan dengan negara-negara lain.

2. Model Aktor Rasional

Graham T.Allison berpendapat bahwa proses pembuatan keputusan luar negeri secara model aktor rasional adalah politik luar negeri dipandang sebagai

akibat dari tindakan- tindakan aktor rasional, terutama sebuah pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah di analogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menerapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang dapat diambil oleh pemerintahnya dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu.¹⁸

Dalam model aktor rasional digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif itu menggunakan kriteria "Optimalisasi Hasil". Para pembuat keputusan itu digambarkan selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaanya. Mereka juga diasumsikan dapat memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga dapat melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.

Model ini sangat terkenal, terutama karena asumsi rasionalitas yang dikandungnya. Dalam model ini para pembuat keputusan itu dianggap rasional,

¹⁸ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LPES, 1990, hal. 234

dan kita pada umumnya memang cenderung berpikir bahwa keputusan -terutama menyangkut politik luar negeri- dibuat secara rasional. Karena itulah, menurut Alisson, model ini paling sering diterapkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri.

Batasan rasional mempunyai arti yang spesifik, dalam proses pembuatan keputusan didasarkan pada empat langkah :¹⁹

1. Pemilihan yang objektif yang bernilai dari suatu kebijakan yang sudah pasti ditujukan pada tujuan maksimal,
2. Pemilihan atas alternatif-alternatif yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan,
3. Perhitungan dari untung dan rugi dari alternatif yang diambil,
4. Pemilihan atas alternatif yang memberikan hasil optimal.

¹⁹ Spainer Uslaner, *American Foreign Policy Making & the Democratic Dilemmas*, CBS College Publishing, New York, 1982, hal. 226

Tabel 1.1: Prakiraan Untung Rugi Dari Negara Rekanan Militer

Alternatif Negara	Keuntungan	Kerugian
Alternatif 1 (Amerika Serikat, Inggris)	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap terjaganya kerjasama militer. - Peralatan militer yang diperoleh tergolong mutakhir. - Usia pakai panjang 	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya mendapatkan peralatan militer yang sudah jadi. - Ketatnya prosedur pembelian dan pengawasan penggunaan peralatan militer. - Terhambatnya upaya Indonesia untuk mandiri dalam bidang kemiliteran - Harga Peralatan militernya tergolong mahal (eropa)
Alternatif 2 (Russia)	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap terjaganya kerjasama militer. - Peralatan militer yang diperoleh cukup mutakhir. - Harga Terjangkau. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya mendapatkan peralatan militer yang sudah jadi. - Terhambatnya upaya Indonesia untuk mandiri dalam bidang kemiliteran. - Kemungkinan mendapat sentimen negatif dari Amerika Serikat.
Alternatif 3 (Korea Selatan)	<ul style="list-style-type: none"> - Menawarkan <i>Transfer of Technology</i> - Biaya lebih murah - Adanya timbal balik pembelian peralatan militer 	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan militer, belum semutakhir yang dimiliki negara produsen peralatan militer.

Tabel 1.1 merupakan prakiraan perbandingan dari untung rugi yang bisa didapat oleh Indonesia dalam kerjasama militer, bisa di lihat terdapat Amerika Serikat, Inggris, Russia, Korea Selatan yang dari masing-masing negara terdapat keuntungan jika bekerja sama namun tidak lepas juga dari kerugian yang bisa didapat. Seperti keuntungan yang bisa didapat dari 3 negara produsen alutsista yaitu, harga yang terjangkau, alutsista yang canggih namun disamping itu juga terdapat aspek kerugian jika hanya memenuhi kebutuhan alutsista dari negara-negara produsen yang dimaksud seperti, pengawasan yang ketat, tidak adanya ToT, harga yang tinggi (eropa).

Selama ini Indonesia memiliki ketergantungan pasokan persenjataan untuk mendukung kemampuan TNI dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia dan Inggris. Terlebih lagi semenjak Amerika Serikat menjatuhkan embargo militer penuh kepada Indonesia pada 1999 yang kontan membuat pasokan peralatan militer dari negara barat terputus seiring dengan penjatuhan embargo tersebut, memang masih ada mitra lain yaitu Rusia yang dapat memenuhi kebutuhan peralatan militer Indonesia. Berdasarkan pengalaman embargo tersebut sudah saatnya Indonesia berusaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan akan pemenuhan Alutsista dari negara lain sekaligus untuk memodernisasi kemampuan peralatan militernya. Jika sebelumnya orientasinya adalah *Arms Maintenance* (pemeliharaan peralatan militer) sudah saatnya pemerintah Indonesia merubah orientasi tersebut menjadi *Arms Built-Up* (pembuatan peralatan militer), dari sisi sumber daya manusia dan penguasaan teknologi sebenarnya Indonesia tidak ketinggalan dari negara lain, contohnya Indonesia sudah mampu memproduksi sendiri beberapa peralatan militer seperti senapan SS-1, SS-2, SPR-1, SPR-2, SPR-3 dan kendaraan tempur ringan lapis baja APS-3 ANOA. Memang peralatan militer yang sudah mampu dihasilkan sendiri oleh Indonesia tergolong masih pada kelas ringan dan menengah belum sampai pada kelas peralatan militer berat.

Pada tahun 2001, Korea Selatan datang kepada pemerintah Indonesia menawarkan sebuah kerjasama riset pembuatan pesawat tempur yang diberi nama KF-X. Kerjasama ini cukup penting karena dinilai memberikan keuntungan lebih bagi Indonesia jika dibandingkan dengan kerjasama pembelian langsung peralatan militer dari negara-negara pengekspor senjata, keuntungan itu antara lain;

1. Korea Selatan bersedia memberikan *Transfer of Technology*,
2. Indonesia mendapatkan lisensi pembuatan KF-X,
3. Biaya yang dikeluarkan Indonesia relatif lebih murah.

Dan pada tahun 2010 akhirnya pemerintah Indonesia sepakat untuk bergabung dan menjalankan kerjasama tersebut dengan Korea Selatan. Disepakatinya kerjasama di bidang teknologi kedirgantaraan antara Korea Selatan dan Indonesia dalam proyek pembuatan pesawat tempur tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mencari alternatif terbaik dan juga tidak menghilangkan aspek kemampuan yang terdapat di dalam negeri yang bisa menjadi modal utama dalam menjalankan proyek tersebut seperti di dukung oleh Industri Pesawat Terbang PT.Dirgantara yang sudah mampu membuat pesawat terbang jenis tertentu untuk kepentingan sipil maupun militer, BPPT, dan sumber daya manusia yang cukup mumpuni untuk menyerap pengetahuan yang akan didapatkan dalam kerjasama ini. Kerjasama ini merupakan langkah Indonesia untuk sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan akan persenjataan (alutsista) kepada negara-negara maju²⁰ dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Indonesia dalam penguasaan teknologi militer.

²⁰*Kerjasama Korea Selatan dengan Indonesia Membuat Pesawat Tempur Canggih* (diakses pada 18 Februari 2012), diunduh dari <http://www.pdii.lipi.go.id/read/2011/11/28/kerjasama-korea-selatan-dengan-indonesia-membuat-pesawat-tempur-canggih.html>

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan kerangka pemikiran teoritis yang digunakan dan telah dijelaskan maka hipotesa yang dapat dirumuskan dari bergabungnya Indonesia dengan Korea Selatan dalam proyek KF-X disebabkan oleh;

Adanya kebutuhan Indonesia terhadap pemenuhan Alutsistanya untuk menjaga keamanan wilayahnya serta keinginan Indonesia untuk bisa mandiri dalam industri kemiliteran karena dalam kerjasama ini terdapat *Transfer of Technology* (ToT) dari Korea Selatan dan Pemberian Lisensi Produksi dan Penjualan terhadap pesawat tempur KF-X/IF/X

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode ekplanasi. Metode eksplanasi yang memiliki tujuan untuk menjelaskan alasan Indonesia bekerjasama dengan Korea Selatan.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik kepustakaan (*library reseach*). Yakni dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, artikel, jurnal ilmiah, buletin dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi persoalan agar tidak menyimpang terlalu jauh dan memudahkan untuk memahami serta menganalisa permasalahan yang ada, maka batasannya adalah dimulai tahun 2000 ketika proyek *Korean Fighter Experiment* diumumkan hingga tahun 2010 ketika Indonesia dan Korea Selatan meneken nota kesepahaman kerjasama KF-X / IF-X. Namun data dan informasi yang berada diluar rentang waktu tersebut masih bisa digunakan selama masih dianggap layak untul digunakan.